

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

Dendy Syaiful Akbar
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
dendysyaiful1984@gmail.com

Ruhiyat
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
ruhiatdoang@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan (Penelitian Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat: Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V). Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi: 1]. Bagaimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada BPJ Wilayah Pelayanan V?; 2]. Bagaimana Kinerja Keuangan BPJ Wilayah Pelayanan V?; 3]. Bagaimana pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan pada BPJ Wilayah Pelayanan V? Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan teknik penelitian sampel (seluruh populasi dijadikan sampel penelitian). Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Koefisien Korelasi dan Uji Hipotesis menggunakan (Uji t). Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V dengan besarnya pengaruh sebesar 56% sedangkan sisanya 44% dipengaruhi faktor lain.

Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Keuangan

I. Pendahuluan

Sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan Negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat. Undang-undang No.17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Melalui permendagri No. 13 tahun 2006 implementasi pradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja dapat diterapkan dalam penyusunan APBD, baik dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. BPJ Wilayah Pelayanan V ini memiliki tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang teknis operasional pelayanan pengelolaan jalan untuk wilayah Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran. Sebagai

salah satu organisasi pemerintah dan organisasi sektor publik, BPJ Wilayah Pelayanan V ini harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya. Penyusunan laporan keuangan tersebut berpedoman pada ketentuan pokok yang menyangkut pengelolaan keuangan dan otonomi daerah serta peraturan pelaksanaannya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam penerapannya diperkuat oleh peraturan daerah.

Penelitian ini difokuskan terhadap Analisa Kinerja Keuangan Daerah pada pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja. Dari data yang diperoleh dari BPJ Wilayah Pelayanan V Tahun 2015 dapat dilihat bahwa tidak satupun dari pos belanja yang jumlah realisasi pengeluarannya mencapai anggaran. Berikut adalah informasi Realisasi Penggunaan Dana BPJ Wilayah Pelayanan V yang merupakan perincian dana per kegiatan pada tahun 2015:

Tabel 1. Realisasi Penggunaan Dana BPJ Wilayah Pelayanan V Tahun 2015

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Nilai SPJ (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)
1	Peningkatan jalan & jembatan provinsi	59.775.727.400,00	54.320.696.111,00	5.445.031.289,00	90,87	100
2	Rehabilitasi jalan & jembatan provinsi	48.671.099.345,00	46.151.747.924,00	2.519.351.421,00	94,82	100
3	Pemeliharaan jalan & jembatan provinsi	17.709.572.000,00	17.431.304.230,00	278.267.770,00	98,43	100
4	Penyelenggaraan administrasi perkantoran	203.427.000,00	188.486.429,00	14.940.571,00	92,66	100
5	Peningkatan sarana & prasarana aparatur	417.597.000,00	415.285.000,00	2.312.000,00	99,45	100
6	Pemeliharaan sarana & prasarana aparatur	135.194.000,00	122.553.850,00	12.640.150,00	90,65	100

Sumber: SKPD BPJ Wilayah Pelayanan V

Dari data di atas dapat diketahui, bahwa realisasi penggunaan dana pada BPJ Wilayah Pelayanan V tidak terealisasi 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan lembaga tersebut belum maksimal, karena tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan di awal. Dari data tersebut memberikan fakta bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja masih belum dapat terealisasi dengan baik oleh BPJ Wilayah Pelayanan V yang merupakan objek

dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang ada, BPJ Wilayah Pelayanan V memiliki perubahan anggaran keuangan yang cukup besar dibandingkan dengan SKPD yang lainnya, namun ternyata realisasi anggaran belanja pada lembaga tersebut tidak mencapai target realisasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya penawaran dari pihak kedua yang nilainya lebih rendah dari nilai anggaran terkait dengan tender proyek pemeliharaan jalan di wilayah pelayanan V. Selain itu hal lainnya yang menyebabkan anggaran tidak mencapai target adalah adanya perubahan harga BBM/Gas, bahan baku bangunan dan material jembatan, serta belanja lainnya. Berikut adalah beberapa kegiatan atau program yang nilainya dibawah nilai anggaran, disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kegiatan/Program yang Nilainya Dibawah Nilai Anggaran Tahun 2015

No	Kegiatan/Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Peningkatan jalan di wilayah Kabupaten/Kota Tasikmalaya	56.521.807.500	51.071.343.055	5.450.464.445
2	Peningkatan jalan di Kabupaten Ciamis & Kota Banjar	3.117.255.400	3.117.088.556	166.844
3	Rehabilitasi jalan di wilayah Kabupaten/Kota Tasikmalaya	32.317.531.125	30.753.339.357	1.564.191.768
4	Rehabilitasi jalan di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar & Kabupaten Pangandaran	7.109.170.200	6.584.904.699	524.265.501
5	Rehabilitasi jalan di Kabupaten Kuningan	9.078.979.400	8.648.376.748	430.602.652
6	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap sub unit wilayah Kab/Kota Tasikmalaya	1.833.270.000	1.782.186.000	51.084.000
7	Belanja BBM/Gas	380.259.000	356.701.400	23.557.600
8	Belanja bahan baku bangunan di wilayah Kab. Ciamis & Kota Banjar	2.226.048.000	2.219.960.560	6.087.440
9	Belanja bahan & material jembatan di Wilayah Kab. Kuningan	196.141.000	184.219.960	11.921.040
10	Belanja jasa kantor	96.000.000	81.289.429	14.710.571
11	Belanja STNK	35.100.000	23.469.100	11.630.900
Total		112.911.561.625	104.822.878.864	8.088.682.761

Sumber: SKPD BPJ Wilayah Pelayanan V (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kegiatan atau program yang nilainya dibawah nilai anggaran. Dari total yang dianggarkan terhadap kegiatan atau program tersebut di atas nilainya adalah sebesar Rp112.911.561.625,00 namun yang terealisasi adalah sebesar Rp104.882.878.864,00, dengan selisih yang nilainya sangat besar, yaitu Rp8.088.682.761,00. Seperti contoh kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalan di beberapa wilayah lingkup pelayanan wilayah V yang di tenderkan kepada pihak kedua, nilai penawarannya di bawah nilai anggaran. Sama halnya dengan kegiatan lainnya, seperti belanja pegawai, belanja BBM/Gas, belanja bahan baku bangunan dan material jembatan seta kegiatan lainnya yang nilainya dibawah nilai anggaran.

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mengikuti segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V perlu menerapkan prinsip-prinsip sistem anggaran berbasis kinerja yang ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2005. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang dapat memahami konsep pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan mengenai pentingnya penganggaran berbasis kinerja agar didukung dalam penerapan anggaran. Dengan adanya pemahaman yang benar dapat menghilangkan rasa saling curiga, tidak percaya dan terwujudnya sinergi antara pihak dalam mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja bagi suatu pemerintah daerah secara baik dan benar sehingga pemerintahan yang baik dapat bersama-sama diwujudkan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1). Penerapan anggaran berbasis kinerja pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V; 2). Kinerja keuangan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V; 3). Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V.

II. Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan yang terjadi pada Badan Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya.

Agar usulan penelitian ini dapat dilaksanakan, maka perlu dipahami konsep variabel berikut ini. *Performance budgeting* (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi (Bastian, 2006:171).

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan,

tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi). Indikator kinerja meliputi (dalam www.perpustakaan.kemenkeu.go.id):

1. Masukan (*Input*) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan.
2. Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.
3. Hasil (*Outcome*) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan.
4. Manfaat (*Benefit*) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.
5. Dampak (*Impact*) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian.

Indikator kinerja di atas sama dengan yang dimaksud oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dalam Pasolong (2013:177) yang menyatakan bahwa Ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*input*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Sementara itu kinerja keuangan pemerintah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai (1) pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, (2) pembangunan dan (3) pelayanan sosial masyarakat (Espinoza, 2014:55).

Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah *Value For Money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Dimana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:

1. Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Bastian, 2010:77). Efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut. Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Secara *absolute*, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Namun, berbagai program di dua perusahaan dalam industri yang sama, dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya. Apabila rasionya lebih besar dari satu dan dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di perusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien (Bastian 2010:208).
2. Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan (Bastian, 2010:77). Ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Jika dimisalkan suatu organisasi bertujuan membangun suatu rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 unit operasi, sebuah departemen kecelakaan dan darurat, serta departemen pasien luar dan semua target tersebut tercapai, maka mekanisme kerja organisasi tersebut efektif. Apabila hanya 150 tempat tidur yang terbangun, maka organisasi tersebut tidak bekerja efektif. Jadi tujuan tersebut harus spesifik, detail, dan terukur. Dalam rangka mencapai tujuan, organisasi sektor publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti ini bisa terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian dari indikator hasil (Bastian 2010:208).
3. Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan *input* dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Bastian 2010:77). Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan *input*. pertanyaan yang diajukan adalah “apakah organisasi telah mengeluarkan biaya secara ekonomis?” (Bastian 2010:208).

Populasi merupakan keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan staff keuangan yang berjumlah 10 orang. Penentuan populasi ini didasarkan kepada tema penelitian, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan pihak yang menyusun pelaporan keuangan. Oleh karena itu, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah bagian keuangan yaitu dari mulai kepala bagian beserta staff-staff nya.

Sampel merupakan bagian yang berguna bagi tujuan penelitian populasi dan aspek-aspeknya. Dengan demikian besarnya ukuran sampel yang diambil sebanyak 10 orang yang merupakan bagian keuangan yaitu dari mulai kepala bagian beserta staff-staffnya. Hal ini didasarkan atas pendapat Arikunto (2006:34) yang mengatakan bahwa “Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden. Data primer penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi responden secara langsung atau daftar pertanyaan kepada responden dari Bagian Keuangan BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya, yaitu sebanyak 10 orang.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting* dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari *settingnya* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber *primer* dan *sekunder*. Sumber *primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber *sekunder* merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Jenis data didalam penelitian ini adalah data primer, maka teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis yaitu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan kinerja keuangan pada BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya.

2. Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan di tempat penelitian, yaitu di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya. Kuesioner disebarakan kepada Kepala Bagian Keuangan beserta staff-staffnya.

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode atau teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya, untuk memperoleh data primer yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah pengisian kuesioner.

Metode kuantitatif ini menggunakan statistik sebagai alat analisis datanya. Fungsi utama dari statistik adalah memanipulasikan dan meringkaskan data yang berupa angka serta membandingkan hasil yang diperoleh dengan kebetulan-kebetulan yang telah diperkirakan. Analisis data kuantitatif dan statistik ini mampu memperlihatkan hasil-hasil pengukuran yang cermat karena perhitungannya yang matematis. Namun kemudian hal ini tidak berarti bahwa kecermatan tersebut merupakan jaminan dalam keabsahannya atau validitasnya.

Korelasi ini dikemukakan oleh Karl Pearson tahun 1900 dalam Santoso (2003:32). Kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Teknik analisis Korelasi PPM termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Misalnya: data dipilih secara acak (random); datanya berdistribusi normal; data yang dihubungkan berpola linier; dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah satu tidak terpenuhi persyaratan tersebut analisis korelasi tidak dapat dilakukan. Rumus yang digunakan Korelasi PPM adalah:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

X = Anggaran Berbasis Kinerja

Y = Kinerja Keuangan

n = Jumlah sampel

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga ($-1 < r < + 1$). Apabilah nilai $r = -1$ artinya korelasinya negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi dan $r = 1$ berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut:

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 - 1,000	Sangat Kuat
0,60 - 0,799	Kuat
0,40 - 0,599	Cukup Kuat
0,20 - 0,399	Rendah
0,00-0,199	Sangat Rendah

Sumber: Sugiyono (2011:250)

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kuantitatif, di mana untuk mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan adalah dengan menggunakan analisis regresi sederhana. "Regresi sederhana berguna dilakukan terhadap model dengan satu variabel bebas, untuk diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat" (Santoso, 2007:34).

Regeresi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, pada analisis regresi ini terdapat satu variabel terikat dan satu variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah anggaran berbasis kinerja, sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah kinerja keuangan.

Model penelitian dalam menguji variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana:

\hat{Y} = Kinerja Keuangan

X = Anggaran Berbasis Kinerja

a = Konstanta

b = Koefisien regresi dari variabel X

Koefisien determinan (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi (R^2) nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, selain itu koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, digunakan rumus koefisien determinasi (R^2) dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi (r) yang telah dihitung dengan rumus sebagai berikut (Kerlinger dan Pedhazur, 1987) dalam Santoso (2007:35):

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien korelasi

Berhubung didalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi sederhana, maka yang digunakan hanya nilai statistik t. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah variabel X benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y.

Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah suatu parameter (β) sama dengan nol atau

$$H_0: \beta = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol atau:

$$H_a: \beta \neq 0$$

Artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel penjelas. Uji t ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Santoso, 2007:36):

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t_{hitung} = Nilai t

r = Nilai koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Ketentuan:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y mempunyai pengaruh yang signifikan.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

III. Hasil

Berikut adalah tabel klasifikasi interval untuk memberikan gambaran mengenai penilaian terhadap Anggaran Berbasis Kinerja di Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V:

Tabel 4. Klasifikasi Interval Anggaran Berbasis Kinerja

Klasifikasi Interval	Penilaian
0-180	Tidak Baik
181-360	Kurang Baik
361-540	Cukup Baik
541-720	Baik
721-900	Sangat Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel klasifikasi interval Anggaran Berbasis Kinerja, maka simpulan mengenai hasil kuesioner adalah sangat baik, karena skor yang diperoleh atas penilaian terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebesar 865. Artinya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

Berikut adalah tabel klasifikasi interval untuk memberikan gambaran mengenai penilaian terhadap Kinerja Keuangan di Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V:

Tabel 5. Klasifikasi Interval Kinerja Keuangan

Klasifikasi Interval	Penilaian
0-60	Tidak Baik
61-120	Kurang Baik
121-180	Cukup Baik
181-240	Baik
241-300	Sangat Baik

Berdasarkan tabel klasifikasi interval Kinerja Keuangan, maka simpulan mengenai hasil kuesioner adalah sangat baik, karena skor yang diperoleh atas penilaian terhadap Kinerja Keuangan adalah sebesar 283. Artinya penerapan Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V sudah dilakukan dengan sangat baik.

Berdasarkan hasil perhitungan Korelasi PPM menunjukkan bahwa variabel independen Anggaran Berbasis Kinerja dengan variabel dependen Kinerja Keuangan memiliki hubungan yang kuat, karena nilai yang dihasilkan adalah sebesar 0,75 yang menurut Korelasi PPM nilai $r = -1$ artinya korelasinya negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi. Hasil analisis tersebut juga menghasilkan nilai r yang positif, artinya antara Anggaran Berbasis Kinerja dengan Kinerja Keuangan memiliki hubungan yang kuat.

Sementara itu hasil perhitungan nilai R^2 adalah sebesar 0,56, hal tersebut menunjukkan bahwa 56% variabel dependen Kinerja Keuangan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen Anggaran Berbasis Kinerja (X). Sedangkan sisanya sebesar 44% (100% - 56%) dipengaruhi oleh sebab-sebab atau faktor-faktor lain diluar model.

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini dihasilkan nilai t_{hitung} adalah sebesar 1,25. Sedangkan t_{tabel} yang dihasilkan adalah sebesar 0,70. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} , yaitu $1,25 > 0,70$ artinya Hipotesis (H_a) pada penelitian ini diterima, artinya ada pengaruh yang positif penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V.

Hasil penelitian ini sejalan dengan PP Nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8 dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Pernyataan di atas yang menyatakan bahwa APBD yang mendasari penganggaran pada organisasi sektor public yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut diperkuat oleh pernyataan Mardiasmo (2002:105) yang menyatakan bahwa “*Performance budget* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja”. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya Mardiasmo (2002:132) menyatakan “Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang

dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*)". Hasil penelitian ini pun sejalan atau sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2009), dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara teori. Hubungan kedua variabel tersebut, yaitu anggaran berbasis kinerja dan kinerja keuangan dapat diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa instansi menjalankan anggaran berbasis kinerja sebagai alat yang efisien dalam hubungannya dengan kinerja keuangan. Apabila anggaran berbasis kinerja dilaksanakan dengan baik, maka kinerja keuangan pun akan baik pula. Dengan kata lain ditemukan bukti anggaran berbasis kinerja sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dari pengaruh yang diberikan oleh variabel independen Anggaran Berbasis Kinerja terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Berbasis Kinerja pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V telah diterapkan dengan sangat baik. Artinya anggaran berbasis kinerja BPJ Wilayah Pelayanan V telah diterapkan secara efektif dan efisien.
2. Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V sudah sangat baik. Artinya bahwa kinerja keuangan BPJ Wilayah Pelayanan V telah efektif, ekonomis dan efisien dalam penerapannya.
3. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V. Artinya semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja pada BPJ Wilayah Pelayanan V, maka akan meningkatkan kinerja keuangan di BPJ Wilayah Pelayanan V.

Daftar Pustaka

- Adisaputo. 2007. *Anggaran Bisnis, Analisis, Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Cooper, D.R & Schindler, P.S. 2006. *Bussines Research Methods*. 9th edition. McGraw-Hill International Edition.

- Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. 2009. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indriantoro, N. & Supomo, B. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. 2010. *Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi. 2005. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Maulana, A. 2005. *Sistem Akuntansi dan Informasi*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasolong, H. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Santosa, B. 2007. *Data Mining Teknik Pemanfaatan Data Untuk Keperluan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. 2011. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja: Suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomi Atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya*. Cetakan Ketiga. Bandung: Mandar Maju.
- Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Soedjono, A. 2002. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Konsep, Model, Kebijakan, Instrumen Serta Strategi*. Surabaya: Airlangga Press.
- Welsch, Hilton, Gordon. 2003. *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Jakarta: Salemba Empat.